

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
KECAMATAN BAKARANGAN**



**RENJA**  
**(RENCANA KERJA)**  
**KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang disusun dengan menggunakan bahan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja SKPD merupakan dasar bagi penyusunan RKPD dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan kebijakan umum APBD ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ), yang merupakan tahap awal dalam proses penyusunan RAPBD.

Renja Kecamatan Bakarangan 2021 ini tentunya tidak luput dari kekurangan maka kritik serta saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang membantu hingga selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bakarangan ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.

**Camat Bakarangan**

**Muhammad Rahmani, S.AP**  
**NIP. 19630205 198602 1 005**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	Bab I-1
1.1 Latar Belakang .....	Bab I-1
1.2 Landasan Hukum .....	Bab-I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	BabI-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	Bab I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	Bab II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.Bakarangan Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD .....	Bab II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan .....	Bab II-7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan SKPD .....	Bab II-9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	Bab II-9
2.5 Pelayanan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	Bab II-11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	Bab III-1
3.1 Ringkasan Uraian Tugas Kecamatan.....	Bab III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	Bab III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	BabIV-1
BAB IV PENUTUP.....	BabIV-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bakarangan Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Kecamatan Bakarangan sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Bappelitbang yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Kecamatan Bakarangan, maka disusunlah Renja SKPD Kecamatan Bakarangan tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2021 SKPD Kecamatan Bakarangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
18. Keputusan Camat Bakarangan Nomor                      Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Kecamatan Bakarangan tahun 2021 Kabupaten Tapin.

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2021 bagi SKPD Kecamatan Bakarangan, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2021.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja 2021, yaitu :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Bakarangan;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Bakarangan;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bakarangan dan Kabupaten Tapin tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

**BAB IV :** Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BAKARANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA SKPD**

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel. T-II.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Tapin**

5 Lbr

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bakarangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Kecamatan Bakarangan. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bakarangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. T-II.2.**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN BAKARANGAN  
Kabupaten Tapin**

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Tahun 2019 (tahun n-2)	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Kondisi Akhir Periode		Tahun 2019 (tahun n-1)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)		(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			85%	85%	85%	85%	84,94 %	85%	85%	85%	
2	Persentase Layanan masyarakat dengan Indeks Minimal 75			100%	100%	100%	100%	82,84 %	82,84%	100%	100%	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Bakarangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Bakarangan sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
5. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Bakarangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Kabupaten Tapin**

Nama SKPD : SKPD XXX

Lembar.....dari.....

5 Lbr

## **2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2021, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD kecamatan Bakarangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. T-II.3.**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2021  
Kabupaten Tapin**

Nama SKPD : Kecamatan Bakarangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**KOSONG**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bakarangan selama tahun 2021 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

##### **a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2020 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

## **b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

## **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Kecamatan Bakarangan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD Kecamatan Bakarangan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Bakarangan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2021 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

**Table. T-III.1**  
**Tujuan dan Sasaran SKPD Kecamatan Bakarangan**  
**Kabupaten Tapin**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	Kondisi Akhir Periode
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	85%	85%
		Persentase Layanan masyarakat dengan Indeks Minimal 75	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	100%	100%

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran III.2.**

**Tabel. III.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Bakarangan Tahun 2021**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kabupaten Tapin**

3 Lbr

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bakarangan dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Kecamatan Bakarangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD Kecamatan Bakarangan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 yaitu: **"Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis"**.

**CAMAT BAKARANGAN,**

**Muhammad Rahmani, S.AP  
NIP. 19630205 198602 1 005**

Mengesahkan  
**BUPATI TAPIN,**

**H.M.Arifin Arpan, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**KECAMATAN BAKARANGAN**  
Jalan SYEKH SALMAN ALFARISI NO. 80 DESA. BAKARANGAN

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT BAKARANGAN**  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA KECAMATAN BAKARANGAN**  
**KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

CAMAT BAKARANGAN  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Surat Bupati Tapin Nomor 050/20-Randal/Bappelitbang Tanggal 06 Februari 2018;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan BAKARANGAN Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Camat BAKARANGAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, serta Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di



Kabupaten Tapin;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
12. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/...../KUM/..... tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BAKARANGAN KABUPATEN TAPIN TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BAKARANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan BAKARANGAN Kabupaten Tapin Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.

## Pasal 2

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan BAKARANGAN Kabupaten Tapin Tahun 2021, meliputi :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec.BAKARANGAN Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD
- B. Analisa Kinerja Pelayanan
- C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan SKPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Pelayanan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja RKPD
- C. Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

## Pasal 3

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 22 Februari 2021

Camat Bakarangan,

**Muhammad Rahmani, S.AP**  
**NIP. 19630205 198602 1 005**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin sebagai laporan;
3. Arsip.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SKPD Kecamatan Bakarangan TAHUN 2021

KABUPATEN TAPIN

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2021 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Bakarangan						362.565.277	0	0		0
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
4	1 Administrasi Pemerintahan										
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 poin  100%  100%	241.410.498	0	0	100	0
4	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		TAPIN	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	968.952	0	0	12 bulan	0
4	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		TAPIN	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	22.285.904	0	0	12 bulan	0
4	1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		TAPIN	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 org/ bulan	14.496.604	0	0	12 org/ bulan	0
4	1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	10.296.411	0	0	12 bulan	0
4	1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		TAPIN	waktu penyediaan pengadaan dan percetakan	12 bulan	4.282.338	0	0	12 bulan	0
4	1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.076.613	0	0	12 bulan	0
4	1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman		TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	20.751.730	0	0	12 bulan	0
4	1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	waktu penyediaan rapat - rapat koordinasi	12 bulan	113.044.444	0	0	12 bulan	0
4	1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		TAPIN	waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 org/ bulan	12.919.365	0	0	12 org/ bulan	0
4	1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP		TAPIN	waktu penyediaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 kali	15.449.407	0	0	1 kali	0
4	1	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	26.659.485	0	0	100	0
4	1	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		TAPIN	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	3.135.212	0	0	1 tahun	0
4	1	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		TAPIN	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	17.086.906	0	0	1 tahun	0
4	1	25 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 buah/set	4.180.283	0	0	7 buah/set	0
4	1	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		TAPIN			2.257.084	0	0		0
4	1	6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	3.626.396	0	0	100	0
4	1	6 1 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 buah	2.581.325	0	0	13 buah	0
4	1	6 9 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD		TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 buah	1.045.071	0	0	2 buah	0

4	1	35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	8.203.805	0	0	100	0
4	1	35	2 Musrenbang Kecamatan		TAPIN	Waktu penyediaan nMusrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.203.805	0	0	1 kegiatan	0
4	1	41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti	100% 100%	65.212.413	0	0	100	0
4	1	41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat		TAPIN	waktu penyediaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 kali	2.769.437	0	0	1 kali	0
4	1	41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa		TAPIN	jumlah persediaan koordinasi aparat desa	bulan 12	26.910.571	0	0	bulan 12	0
4	1	41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa		TAPIN	waktu penyediaan pengawasan dana desa	12 bulan	22.991.556	0	0	12 bulan	0
4	1	41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan		TAPIN	jumlah penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	1 tahun	12.540.849	0	0	1 tahun	0
4	1	47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	75% 100%	17.452.680	0	0	100	0
4	1	47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan		TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali	4.023.522	0	0	1 kali	0
4	1	47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa		TAPIN	waktu penyediaan Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 kali	2.769.437	0	0	1 kali	0
4	1	47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan		TAPIN	waktu penyediaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 kali	10.659.721	0	0	1 kali	0
<b>TOTAL</b>								<b>362.565.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN BAKARANGAN**

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN ( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR )	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan  Persentase Layanan masyarakat dengan Indeks Minimal B	<i>Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat</i>	Sekcam	Hasil Survey
2.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	<i><math>\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100 \%</math></i>	Kasi Terantib	Laporan Pengaduan
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	<p style="text-align: center;"><i><math>\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Administrasi Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%</math></i></p> <p>Desa yang memiliki administrasi sesuai ketentuan adalah desa yang memiliki dokumen-dokumen sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa dan 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, serta perbup nomor 14 tahun 2015 tentang tatacara pengadaan barang dan jasa</p>	Kasi Pemerintahan	Laporan

Tabel. III.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Bakarangan Tahun 2021  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Tapin

SKPD : BAKARANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Meneurut Sumber Dana Tahun 2019 (RP.)			Perkiraan Maju Tahun 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD KAB	APBR PROV	APBN				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Dan Kinerja Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan (Nilai)	85				241.410.498			253.481.023		kec. Bakarangan
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B (%)	100									
					Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (%)	100									
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100									
	Penyediaan jasa surat menyurat			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan jasa surat menyurat (Bln)	12		968.952			1.017.400		kec. Bakarangan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bln)	12		22.285.904			23.400.199		kec. Bakarangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12		14.496.604			15.221.434		kec. Bakarangan
	Penyediaan alat tulis kantor			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bln)	12		10.296.411			10.811.232		kec. Bakarangan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bln)	12		4.282.338			4.496.455		kec. Bakarangan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor (Bln)	12		1.076.613			1.130.444		kec. Bakarangan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			kec. Bakarangan			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pkt)	1		-			-		kec. Bakarangan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bln)	12		-			-		kec. Bakarangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Meneurut Sumber Dana Tahun 2019 (RP.)			Perkiraan Maju Tahun 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD KAB	APBR PROV	APBN			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan makanan dan minuman			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan makanan dan minuman kantor (Bln)	12	20.751.730			21.789.317		kec. Bakarangan
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bln)	12	113.044.444			118.696.666		kec. Bakarangan
	Penyediaan jasa keamanan kantor			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12	12.919.365			13.565.333		kec. Bakarangan
	Penyediaan jasa pelayanan e-KTP			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP (Bln)	12	25.838.730			27.130.667		kec. Bakarangan
	Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar HUT-RI			kec. Bakarangan			Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI (Kali Kgtn)	1	15.449.407			16.221.877		kec. Bakarangan
	Penyediaan jasa sertifikasi tanah bangunan kantor dan rumah dinas			kec. Bakarangan			Jumlah Penyediaan sertifikasi tanah bangunan kantor dan rumah dinas (Dok)	2	-			-		kec. Bakarangan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Dan Kinerja Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Parasana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)</b>	<b>80</b>			<b>26.659.485</b>			<b>27.992.459</b>		kec. Bakarangan
	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas			kec. Bakarangan			Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas (Unit)	1	-			-		kec. Bakarangan
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			kec. Bakarangan			Jumlah unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	1	-			-		kec. Bakarangan
	Pengadaan mebeleur			kec. Bakarangan			Jumlah unit pengadaan mebeleur (Unit)	1	-			-		kec. Bakarangan
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			kec. Bakarangan			Jumlah Paket pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (Pkt)	1	-			-		kec. Bakarangan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			kec. Bakarangan			Jumlah Paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pkt)	1	3.135.212			3.291.973		kec. Bakarangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Meneurut Sumber Dana Tahun 2019 (RP.)			Perkiraan Maju Tahun 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD KAB	APBR PROV	APBN			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)	12	17.086.906			17.941.251		kec. Bakarangan
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas			kec. Bakarangan			Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas (Bln)	12	-			-		kec. Bakarangan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			kec. Bakarangan			Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Pkt)	12	2.257.084			2.369.938		kec. Bakarangan
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			kec. Bakarangan			Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (buah/set)	7	4.180.283			4.389.297		kec. Bakarangan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Dan Kinerja Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel</b>		<b>Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja / Keuangan dan Dokumen Perencanaan Yang Wajib Disusun Oleh SKPD (%)</b>	<b>100</b>			<b>3.626.396</b>			<b>3.807.716</b>		kec. Bakarangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			kec. Bakarangan			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dok)	13	2.581.325			2.710.391		kec. Bakarangan
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			kec. Bakarangan			Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun (Dok)	2	1.045.071			1.097.325		kec. Bakarangan
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM, KAMTIBNAS DAN ORGANISASI KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat</b>	<b>Meningkatnya penyediaan Administrasi perkantoran, sarana prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja / Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)</b>	<b>100</b>			<b>65.212.413</b>			<b>68.473.034</b>		kec. Bakarangan
					<b>Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti (%)</b>	<b>100</b>								kec. Bakarangan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Meneurut Sumber Dana Tahun 2019 (RP.)			Perkiraan Maju Tahun 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD KAB	APBR PROV	APBN			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			kec. Bakarnagan			Jumlah pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)	1	2.769.437			2.907.909		kec. Bakarnagan
	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			kec. Bakarnagan			Jumlah pembinaan Aparat Pemerintahan Desa (bulan)	12	26.910.571			28.256.100		kec. Bakarnagan
	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			kec. Bakarnagan			Waktu penyediaan pengawasan dana desa (bulan)	12	22.991.556			24.141.134		kec. Bakarnagan
	Pemantauan Pemilihan Kepala Desa			kec. Bakarnagan			Waktu Pelaksanaan pemantauan Pemilihan Kepala Desa (kali desa)	7	-			-		kec. Bakarnagan
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			kec. Bakarnagan			Jumlah penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan (bulan)	12	12.540.849			13.167.891		kec. Bakarnagan
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat</b>	<b>Meningkatnya penyediaan Administrasi perkantoran, sarana prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja / Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)</b>	<b>100</b>			<b>8.203.805</b>			<b>8.613.995</b>		kec. Bakarnagan
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			kec. Bakarnagan			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	1	8.203.805			8.613.995		kec. Bakarnagan
	Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan			kec. Bakarnagan			Jumlah Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan (Kali Kgtn)	1	-			-		kec. Bakarnagan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat</b>	<b>Meningkatnya penyediaan Administrasi perkantoran, sarana</b>		<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)</b>	<b>75</b>			<b>17.452.680</b>			<b>18.325.314</b>		kec. Bakarnagan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Meneurut Sumber Dana Tahun 2019 (RP.)			Perkiraan Maju Tahun 2020	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD KAB	APBR PROV	APBN			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja / Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100								kec. Bakarngan
	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			kec. Bakarngan			Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (Kali Kegiatan)	1	4.023.522			4.224.698		kec. Bakarngan
	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			kec. Bakarngan			Jumlah pelaksanaan pembinaan keagamaan (Kali Kegiatan)	1	10.659.721			11.192.707		kec. Bakarngan
	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa			kec. Bakarngan			Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa (Kegiatan)	1	2.769.437			2.907.909		kec. Bakarngan
<b>JUMLAH</b>										<b>362.565.277</b>			<b>380.693.541</b>	

Bakarngan,

**MUHAMMAD RAHMANI, S.AP**  
NIP. 19630205 198602 1 005